



Judul : Pengeanaan PPN sembako resmi diajukan ke DPR
Tanggal : Rabu, 15 September 2021
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 3

Pengeanaan PPN Sembako Resmi Diajukan ke DPR

JAKARTA – Wacana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok (sembako) dan sekolah kembali bergulir. Jika terealisasi, potensi pendapatan pajak sembako diperkirakan mencapai angka Rp21 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara resmi mengajukan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang kebutuhan pokok atau sembako, jasa pendidikan atau sekolah, dan jasa kesehatan kepada Komisi XI DPR RI.

Meskipun jasa pendidikan atau sekolah yang dikenakan PPN memang telah diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), tapi Menkeu menegaskan PPN hanya berlaku untuk sekolah tertentu.

"Pengeanaan PPN ditujukan untuk jasa pendidikan yang di-

selenggarakan oleh pendidikan bersifat komersial dan lembaga pendidikan yang tidak menyelenggarakan kurikulum minimal yang dipersyaratkan oleh UU Sistem Pendidikan Nasional," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (13/9).

Dengan kata lain, hal tersebut diajukan untuk membedakan jasa pendidikan yang diberikan secara masif oleh pemerintah dengan swasta yang mencari keuntungan. Kemudian sekolah negeri juga madrasah tidak akan dikenakan PPN.

"Untuk membedakan terhadap jasa pendidikan yang diberikan secara masif oleh pemerin-

tah maupun oleh lembaga sosial lain dibandingkan yang memang men-charge dengan SPP yang luar biasa tinggi. Dengan demikian, madrasah dan yang lain tentu tidak akan dikenakan dalam skema ini," ucapnya.

Begitu juga dengan PPN yang direncanakan untuk jasa kesehatan, ditujukan hanya untuk sektor yang dibayar tidak melalui sistem jaminan kesehatan nasional. Lebih lanjut, kebijakan pungutan pajak nanti semua jenis akan dibuatkan kriteria.

"Misalnya yang dilakukan oleh jasa-jasa klinik kecantikan esthetika, operasi plastik yang sifatnya nonesensial. Juga, untuk peningkatan peran masyarakat dalam penguatan sistem jaminan kesehatan nasional, treatment ini akan memberikan insentif masyarakat dan sistem kesejahteraan masuk dalam sistem jaminan kesehatan nasional," pungkas Menkeu.

Sementara itu, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef)

Rusli Abdullah mengungkapkan, potensi pendapatan negara dari pajak sembako diproyeksikan mencapai Rp21,107 triliun.

Angka tersebut diperoleh Rusli melakukan penghitungan dengan basis data pengeluaran per kapita per bulan pada 2020, yaitu sebesar Rp268.149 per keluarga. Jumlah tersebut kemudian dikalikan 12 (jumlah bulan dalam satu tahun) yang menghasilkan angka Rp3,2 juta pengeluaran untuk delapan komoditas yang akan dikenakan pajak.

Selanjutnya, pengeluaran per kapita dalam satu tahun itu dikalikan dengan jumlah keluarga (rumah tangga) di Indonesia yang mencapai 65 juta. Dari penjumlahan tersebut diperoleh hasil Rp211 triliun. Jumlah itu kemudian dikalikan 10% sebagai anggapan PPN yang akan dikenakan, maka hasilnya negara mendapatkan pajak dari PPN sembako senilai Rp21,107 triliun.

"Kalau kita lihat dari pening-

katan *tax ratio* kita, terlihat PPN sembako ini hanya menyumbang 1,28% dari total pajak 2019 atau 1,97% dari total pajak 2020," ujar Rusli pada diskusi publik secara daring kemarin.

Rusli melihat angka ini kalau seandainya mau ditambahkan untuk kontribusi *tax ratio*, sebenarnya sangat kecil. Menurut dia, masih jauh lebih besar ketika negara mengejar sumber pajak penghasilan (PPh) dari badan beberapa usaha menengah yang masih belum formal.

"Itu bisa diambil darisana untuk bisa meningkatkan kenaikan *tax ratio* dari sisi PPh-nya, bukan dari sisi PPN-nya, karena cuma Rp21 triliun PPN sembako, belum lagi memiliki banyak tantangannya," cetusnya.

Untuk itu, Rusli menilai pengenaan PPN sembako, apalagi di tengah pandemi Covid-19, kurang tepat. Menurut dia, dengan adanya narasi ini pasti akan menimbulkan dampak psikologis, dan menjadikan masyarakat semakin tertekan.

"Justru yang ditakutkan akan ada kenaikan inflasi, semacam inflasi yang diekspektasi di masa depan," tandasnya.

Selain itu, Rusli menilai pemungutan PPN sembako juga tidaklah mudah. Ada sejumlah tantangan seperti masih besarnya sektor informal dalam perekonomian nasional.

"Jadi, salah satu tantangan pajak di Indonesia adalah entitas bisnis di kita itu sebagian besar masih informal, misalnya UMK atau para pekerja, itulah sebabnya masih banyak *informality* dari perekonomian kita sehingga perluasan basis pajak itu akan susah," tambahnya.

Hal selanjutnya yang menjadi masalah, menurutnya, adalah ketika pemungutan pajak dilakukan pada sembako adalah sumber daya manusia perpajakan yang terbatas. Rusli menyebutkan, pegawai pajak di Indonesia hanya berjumlah 45.000 orang untuk melayani 270 juta penduduk.

"Jepang dengan penduduk

126 juta fisiknya dua kali dari Indonesia. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri teman-teman di Kementerian Keuangan," tuturnya.

Rusli menambahkan, kondisi yang saat ini lum optimal kemudian ma tambahkan lagi dengan ju PPN sembako dan sektor ir malyang masih cukup besa fiskus, tentunya akan mem beban kerja pihak perpaj bertambah.

"Ketika beban kerja bertambah, ditakutkan memuncu distorsi-distorsi di lapangan pemungutan sehingga yang diharapkan di atas ke berbeda dengan eksekusi c pangan," jelasnya.

Hal itu lebih dikhawatirkan Rusli akan menimbulkan kos sosial dan politik y mungkin lebih besar. "Kai isu, sembako ini menyasar ruh lapisan masyarakat di l nesia," tegasnya.

□ *langgie ariesta/ iqbal dwi purnama*